

Hak - Hak Konsumen

1. Hak atas keselamatan
2. Hak untuk diberitahu
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar

Gerakan Organik

Sebagian besar petani-petani di Indonesia –khususnya di luar Jawa—adalah para petani organik yang terbentuk secara tidak sengaja justru karena mereka tidak menjadi target atau berpartisipasi dalam “revolusi hijau” dan masih tetap melanjutkan metode pertanian tradisional. Di wilayah lain, para petani tidak lagi dapat membeli pestisida dan pupuk ketika harga melonjak sebagai akibat krisis ekonomi. Hal ini berarti bahwa argumen tentang pertanian organik telah mulai memiliki makna yang semakin berarti. Beberapa kelompok petani dan LSM melihat pertanian organik sebagai cara melawan dampak buruk revolusi hijau, dan membebaskan para petani dari dominasi revolusi hijau – seperti ketergantungan terhadap pupuk kimia, pestisida dan bahan-bahan pertanian lainnya yang sejenis.

Meskipun demikian, kesadaran publik tentang apa yang disebut sebagai “pertanian organik” serta kebutuhan konsumen terhadap tanaman organik masih sangat rendah di Indonesia (tak ada sertifikasi atau penggunaan label secara nasional untuk makanan organik seperti juga tidak adanya label bagi makanan mengandung GMO. Salah satu toko yang menjual bahan-bahan organik dibentuk di Yogyakarta pada tahun 1997 oleh Konsorsium Komunitas Pedagangan yang Adil, dengan dana dari Oxfam. Para pemilik toko, yang mengembalikan sebagian besar keuntungan kepada para petani, mengatakan bahwa cukup sulit untuk mendapatkan orang yang mau membayar harga lebih tinggi bagi hasil organik.

LSM-LSM seperti Jaringan Aksi Pestisida (PAN) Indonesia, SPTN-HPS, ELSPAT (Bogor) dan Sintesa di Sumatra Utara sedang mencoba mengangkat perdebatan tentang pertanian di masyarakat di mana pada saat bersamaan melaksanakan program-program praktis dengan kelompok-kelompok petani. Mereka adalah anggota-anggota Jaringan Kerja Pertanian Organik yang anggotanya adalah LSM dan kelompok petani. Meskipun jaringan tersebut bukan anggota IFOAM, (International Federation of Organic Agriculture Movements) atau Federasi Internasional Gerakan Pertanian Organik (lihat www.ifoam.org) jaringan kerja nasional tersebut telah bekerja sama dengan IFOAM dalam berbagai kegiatan.

Tanah

Organisasi-organisasi LSM di Indonesia yang memiliki hubungan kuat dengan gerakan untuk mendapatkan tanah atau reformasi agraria berpendirian bahwa penguasaan tanah dan kondisi lingkungan politik yang terbuka dan demokratis merupakan landasan dasar pertanian yang berkelanjutan. ‘Berkelanjutan’ berarti bukan sekedar berkelanjutan dalam

bidang lingkungan, tetapi juga secara sosial, politik dan ekonomi. Mereka telah menjalankan kegiatan-kegiatan yang kongkrit sebagai titik tolak untuk membantu para petani agar dapat menguasai kembali lahan dan juga meningkatkan kekuatan tawar mereka di pasar. Para petani juga telah bergerak untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara khusus dan memperjuangkan reformasi agraria secara umum. (*Jakarta Post* 19/Feb/01; konferensi pers dengan ELSPAT).

Proyek Organik ELSPAT

Selama kunjungannya ke London, pendiri ELSPAT, Any Sulstyowati menjelaskan program pertanian organik skala kecil yang dikerjakan oleh LSM di atas lahan-lahan kecil di Bogor:

”Program ini bertujuan menyediakan pekerjaan bagi para pekerja informal yang menganggur akibat krisis ekonomi. Program ini ini dimulai dengan penggunaan lahan kecil yang disewa dari seorang pemilik tanah di kota, yang biasanya digunakan untuk menanam sayuran. Selanjutnya, program ini kemudian berkembang dengan memasukkan beberapa petak tanah yang dimiliki petani, atau tanah orang lain yang disewa bagi petani tak bertanah.

Produk-produk mereka dijual oleh koperasi petani (kelompok-kelompok petani) yang dibentuk melalui program yang menggunakan sistem pengantaran secara langsung kepada konsumen yang dengan demikian berupaya memotong jalur para perantara. Barang-barang ini kemudian ditentukan perbedaannya antara pasar tradisional dan harga supermarket. Pada awalnya, kita menjual barang-barang ini kepada orang-orang LSM, tetapi kemudian, dari mulut ke mulut, kita juga bisa menjual lebih banyak kepada ibu-ibu rumah tangga di perkotaan yang mulai membeli barang kami.

Ketika kami melakukan hal ini, kita seringkali mendapatkan komentar-komentar dari para petani tua yang tinggal berdekaatan, saat mereka melihat kami menggunakan pupuk kompos, yang mengatakan “kenapa kamu menggunakan cara lama? Kita telah meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu!” Meskipun demikian, petani-petani ini tertarik dengan kenyataan bahwa kita tidak perlu membayar mahal untuk bahan-bahan kimia dan kita bisa memotong jalur para perantara untuk menjual barang.

Dalam pengalaman kami, persoalan pertanian organik sangat membutuhkan pupuk organik dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, sepanjang para petani tidak memiliki ternak, mereka harus membelinya. Dengan demikian, gagasan kita adalah untuk menciptakan sistem pertanian organik yang terintegrasi. Tetapi, sebelum kita mencapai tahapan ini, kita harus berurusan terlebih dahulu dengan kebutuhan-kebutuhan dasar petani. Persoalannya mereka tidak bisa mendapatkan uang yang cukup dari kegiatan pertanian tersebut karena tanah mereka sangat terbatas.

Sekarang ini telah ada lebih banyak peluang untuk bekerja di sektor informal. Khususnya di desa-desa di mana di wilayah sekitarnya terdapat peningkatan permintaan untuk pekerjaan konstruksi untuk membangun kuburan Cina. Kebanyakan orang-orang muda

yang telah kembali bekerja, tetap terlibat dalam dialog yang berkelanjutan dengan para petani di desa tetangga mereka tentang kegunaan pertanian

Gerakan Mahasiswa Harus Menjadi Gerakan Politik

Jakarta, Kompas - Untuk mewujudkan cita-cita politik seperti yang diinginkan, gerakan mahasiswa harus menjadi gerakan politik dan tidak sebatas gerakan moral.

Demikian rangkuman "Diskusi Lintas Generasi, Refleksi 2002, Prediksi 2003" di Jakarta, Senin (16/12), yang dihadiri oleh Hariman Siregar mewakili generasi mahasiswa angkatan 1974, Bram Zakir (1978), Fajroel Rachman (1980), dan Adian Napitupulu (1998).

Napitupulu berpendapat, gerakan mahasiswa di Tanah Air berulang kali hanya melakukan tuntutan dan menyerahkan pelaksanaan tuntutan kepada negara. Padahal, mahasiswa sebenarnya mengerti bahwa sumber ketimpangan dan destabilisasi adalah negara.

"Ketika rezim Soeharto jatuh, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta menyerahkan kekuasaan kepada empat elite politik. Inilah kesalahan awal gerakan mahasiswa yang membuat enam tuntutan mahasiswa sia-sia," ujarnya.

Fajroel sependapat. Menurut dia, gerakan mahasiswa seharusnya tidak berhenti sebagai gerakan moral dan gerakan menumbangkan rezim saja, tetapi juga harus merebut dan membangun kekuasaan. "Bagaimana mungkin gerakan mahasiswa bisa mewujudkan cita-cita politik mereka tanpa memperoleh kekuasaan?" ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk mendapatkan kekuasaan, gerakan mahasiswa harus membangun gerakan ekstraparlementer lewat mobilisasi massa dan gerakan intraparlementer dengan masuk ke kancah politik formal. Oleh karena itu, sebagian gerakan mahasiswa harus mendirikan partai-partai politik.

Bram Zakir lebih melihat gerakan mahasiswa sebagai perekat agar kinerja rezim bertambah besar. "Itulah yang pernah dilakukan angkatan 66 walau di tengah perjalanan mereka terdistorsi kebijakan militer yang otoritarian," paparnya.

Dia berpendapat, sejak rezim Soeharto jatuh, gerakan mahasiswa tidak mendapat dukungan konsolidasi masyarakat prodemokrasi sehingga mudah dipecah belah dengan uang, jabatan, dan janji-janji.

Menurut Siregar, gerakan mahasiswa akan bangkit kembali bila lembaga-lembaga negara mengalami kemandekan dan krisis kepercayaan masyarakat. Keempat pembicara juga sepakat, tahun depan menjadi tahun yang tepat menggalang kembali kekuatan gerakan mahasiswa, meskipun mungkin baru sebatas membangun kekuatan oposisi. "Tapi mereka tidak boleh lagi menunggu. Mereka harus mulai kembali," kata Fajroel. (win)